

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah (Kanwil) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 52 ayat (1) PMK Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Adapun jenis Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, KPP Pratama. Kantor Pelayanan Pajak tersebut mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan terakhir pada bulan Desember 2015, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 telah menjadi 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 2 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yakni:

1. KPP Madya Bandung
2. KPP Pratama Bandung Bojonagara

3. KPP Pratama Bandung Cibeunying
4. KPP Pratama Bandung Cicadas
5. KPP Pratama Bandung Karees
6. KPP Pratama Bandung Tegalega
7. KPP Pratama Ciamis
8. KPP Pratama Cianjur
9. KPP Pratama Cimahi
10. KPP Pratama Purwakarta
11. KPP Pramana Soreang
12. KPP Pratama Majalaya
13. KPP Pratama Sukabumi
14. KPP Pratama Sumedang
15. KPP Pratama Tasikmalaya
16. KPP Pratama Garut
17. KP2KP Banjar
18. KP2KP Pelabuhan Ratu

Berikut adalah data penerimaan pajak pusat pada kota-kota di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Pusat Kantor Wilayah Jawa Barat 1
Tahun 2010-2014

Kota	Tahun					Total
	2010	2011	2012	2013	2014	
Sukabumi	363,661,854,395	407,669,565,842	526,064,934,525	619,799,351,470	167,981,724,579	2,085,177,430,811
Cianjur	209,496,165,810	251,198,948,020	286,772,544,570	306,611,776,446	79,794,134,523	1,133,873,569,369
Purwakarta	416,916,030,630	618,028,766,130	763,285,456,188	841,254,133,290	282,405,704,471	2,921,890,090,709
Cimahi	390,381,131,934	609,788,085,505	717,441,976,421	787,123,955,301	228,747,662,739	2,733,482,811,900
Tasikmalaya	214,487,244,948	362,657,319,562	449,613,939,571	476,737,738,311	100,681,787,039	1,604,178,029,431
Ciamis	128,597,030,728	208,890,616,132	262,411,011,534	295,182,936,801	37,759,127,339	932,840,722,534
Garut	184,684,540,322	236,496,128,815	318,262,103,833	369,981,652,179	58,940,227,789	1,168,364,652,938
Majalaya	132,391,489,602	212,333,453,431	243,668,974,703	283,567,402,810	77,309,235,404	949,270,555,950
Kota Bandung	5,852,988,177,330	8,316,229,440,508	9,195,555,626,738	11,066,362,951,139	2,945,441,812,465	31,523,589,830,850
Kabupaten Bandung	780,328,396,553	1,316,156,029,827	1,586,346,639,417	1,795,515,261,075	503,301,203,867	5,201,319,134,186

Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat 1 dan data diolah (2016)

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat total penerimaan pajak kota Bandung lebih besar di bandingkan dengan penerimaan pajak di kota lain dalam lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 sehingga penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak di kota Bandung sebagai objek dalam penelitian ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi wajib pajak di kota Bandung yang pesat menjadikan kota Bandung memiliki potensi pendapatan pajak yang besar, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Kantor Pelayanan Pajak di kota Bandung terdiri dari:

1. KPP Madya Bandung
2. KPP Pratama Bandung Bojonagara
3. KPP Pratama Bandung Cibeunying
4. KPP Pratama Bandung Cicadas
5. KPP Pratama Bandung Karees
6. KPP Pratama Bandung Tegalega

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, dengan demikian sebagai ibu kota provinsi, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Perkembangan kota Bandung semakin pesat dan meluas. Kota Bandung memiliki lima fungsi kota, yaitu sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata.

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Kondisi ini menjadikan kota Bandung menjadi magnet bagi kota-kota disekitarnya. Pada awalnya kota Bandung merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis. Sektor perdagangan dan jasa saat ini mendominasi pertumbuhan ekonomi di kota Bandung. Laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tergolong tinggi, diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Setelah dibukanya akses jalan tol dari Jakarta, kota Bandung menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jabodetabek khususnya di akhir pekan dan libur panjang. Hal ini akan berdampak pada permintaan

barang konsumsi dan jasa dikota Bandung yang memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi kota Bandung. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi penerimaan pajak pusat kota Bandung.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, penduduk yang terdidik dan ketersediaan tenaga kerja membantu kota Bandung untuk menjalankan kegiatan investasi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat seiring meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi kota Bandung menyebabkan turunnya tingkat pengangguran. Perkembangan kota Bandung sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Jawa Barat memberikan banyak kesempatan kepada investor untuk menanamkan modal di Kota ini. Dengan meningkatnya investasi di kota Bandung yang ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan tempat wisata, kuliner, belanja dan pusat bisnis lainnya diharapkan akan memberikan penerimaan pajak yang tinggi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

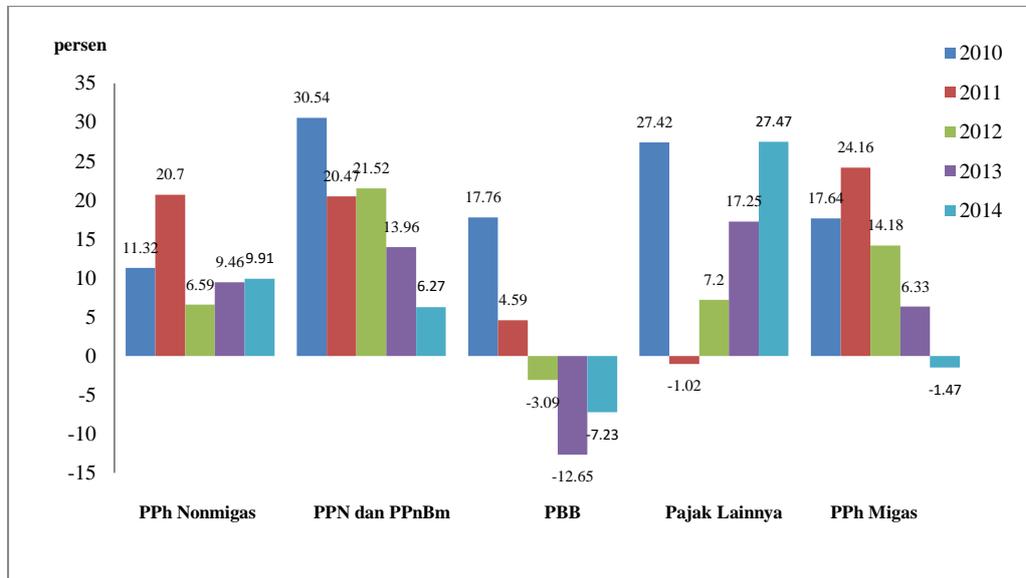
Pada dasarnya pembangunan ekonomi menjadi tujuan dari semua negara. Pembangunan ekonomi berarti suatu proses pengurangan atau penghapusan kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan, dan pengangguran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi tersebut berbeda antara negara maju dengan negara berkembang, karena pada negara maju sudah menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kemajuan di berbagai bidang, sedangkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia belum dapat mencapai hal itu.

Peran pemerintah sebagai stabilisator perekonomian dapat dijalankan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dalam perekonomian. Salah satu kebijakan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian perekonomian adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yaitu dalam perpajakan.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk.”(Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH dalam modul pelatihan pajak brevet A dan B – IAI, 2014:1). Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan mengurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Antara lain memiliki fungsi sebagai fungsi penerimaan yaitu sebagai dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Dalam penelitian ini penerimaan pajak yang dimaksud adalah penerimaan pajak dalam negeri di Indonesia yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peranannya terhadap pembiayaan dalam APBN meningkat setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak netto tahun 2014 sebesar Rp 985,13 triliun atau mencapai 91,86% dari target APBN Perubahan 2014. Jumlah tersebut tumbuh

6,92% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2013 (Laporan Tahunan DJP, 2014:95). Berikut merupakan pertumbuhan pendapatan pajak dalam negeri tahun 2010-2014:



Sumber: www.pajak.go.id dan data diolah oleh penulis (2016)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun 2010-2014

Dari gambar 1.1, tampak bahwa realisasi penerimaan PPh Non Migas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2012 pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas hanya sebesar 6,59% dari realisasi penerimaan PPh Non Migas tahun 2011, hal tersebut disebabkan oleh penerimaan PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 26 Badan yang mengalami perlambatan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -1,60% sementara pertumbuhan PPh Pasal 25/29 di tahun 2011 mencapai 17,58%. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor serta menurunnya produksi di sektor pertambangan dan penggalian. Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -9,65%. Perlambatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga beberapa wajib pajak menurunkan pembayaran PPh

Pasal 26 (Laporan Tahunan DJP, 2012:138). Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM hanya sebesar 6,18% dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013. Namun pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Secara umum melambatnya pertumbuhan PPN dalam negeri disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami tekanan akibat menguatnya kondisi perekonomian Amerika Serikat sepanjang tahun 2014 sehingga mendorong arus kas keluar yang cukup besar dari Indonesia. Penerimaan PPnBM tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -11,33% dari realisasi penerimaan PPnBM tahun sebelumnya. Menurunnya kinerja penerimaan PPnBM salah satunya disebabkan adanya kebijakan pemberian insentif pembebasan PPnBM terhadap mobil murah *Low Cost Green Car* (LCGC) yang menggeser selera dan konsumsi masyarakat terhadap mobil mewah. Penerimaan PPnBM Impor tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan -26,72% dari realisasi penerimaan PPnBM Impor tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan impor dalam rangka menggalakkan pasar ekspor berimbas pada penurunan penerimaan PPnBM Impor (Laporan Tahunan DJP, 2014:97). Realisasi penerimaan PBB menurun mulai tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan mekanisme pengenaan areal *on-shore* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 serta adanya penangguhan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Migas oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Laporan Tahunan DJP, 2012:139). Jika dibandingkan tahun 2012, pertumbuhan penerimaan PBB tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -12,65%. Hal tersebut disebabkan karena penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) mengalami pertumbuhan realisasi karena adanya pengalihan pengolahan PBB-P2 ke pemerintah daerah. Penerimaan PBB sektor pertambangan migas tidak mencapai target karena dasar ketetapan PBB Migas 2013 dibawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-Perubahan, ada beberapa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 yang mencapai Rp1,4 triliun dan pembayaran PBB Migas yang seharusnya disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak masih sangat minim (Laporan Tahunan DJP, 2013:120). Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar 1,02% dari realisasi penerimaan Pajak Lainnya tahun 2010. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014, realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea materai. Pajak Lainnya terdiri atas pendapatan Bea Materai, Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pendapatan Bunga Penagihan Pajak. Realisasi penerimaan PPh Migas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 penerimaan PPh migas mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -1,47% dari realisasi penerimaan PPh Migas tahun 2013. Penerimaan PPh Migas dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah, *lifting* minyak bumi, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika (Laporan Tahunan DJP, 2013:120).

“Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.”(Sadono Sukirno, 2011:9). Selama ini pajak yang dipungut pemerintah telah memberikan kontribusi yang positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (www.bi.go.id). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (www.bi.go.id). Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan propinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang

terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (www.bps.go.id).

Dalam setiap perekonomian, kegiatan memproduksi memerlukan barang modal untuk dapat mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya yang dapat digunakan sebagai jaminan sosial di masa depannya. Menurut Sukirno (2011:376) menyatakan bahwa:

Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang baru yang lebih modern atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang.

Investasi atau penanaman modal harus dilakukan untuk menjamin agar perusahaan tetap berproduksi dan tetap bersaing dengan perusahaan lain. Investasi banyak jenis dan macamnya, sehingga harus pandai melihat peluang dari berbagai sektor untuk menanamkan saham. Pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan investasi, baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta lebih dikenal dengan sebutan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sedangkan investasi dari pihak luar dikenal dengan sebutan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya investasi maka kegiatan produksi akan meningkat dan akan mempengaruhi *output* yang dihasilkan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kota Bandung adalah kota yang sedang berkembang. Kehidupan perekonomian di Bandung berjalan sangat cepat dan dinamis seiring dengan meningkatnya perkembangan jaman di bidang teknologi dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survey terhadap sumber-sumber aktivitas ekonomi di kota Bandung dan mencatat beberapa omset dari usaha-usaha ekonomi tersebut. Kemudian BPS menghitung berapa omset tersebut yang merupakan pembayaran tenaga kerja dan keuntungan dari kepemilikan modalnya, atau dalam istilah ekonomi disebut pembayaran faktor primer. Pembayaran faktor primer inilah yang kemudian menjadi PDRB kota Bandung. Pertumbuhan ekonomi kota Bandung selama 5 tahun terakhir sekitar 8% pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 6% (www.ceds.fe.unpad.ac.id). Sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh aktivitas ekonomi di sektor jasa. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi tanda bahwa kota ini sedang berkembang. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat khususnya wajib pajak untuk membayar pajak.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Paris van Java, selain lama dikenal sebagai kota *fashion*, juga tidak bisa lepas dari dua hal yaitu wisata dan investasi. Investasi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya pariwisata dan bisnis di kota Bandung, para investor mulai melirik kota Bandung sebagai tujuan investasi. Minat investasi di kota Bandung lebih diarahkan pada investasi padat modal, seperti di bidang jasa, industri kreatif dan properti. Harga-harga

rata-rata tanah di kota Bandung sebesar Rp. 2,7 Juta/m² sedangkan rumah Rp. 6 Juta/m², dalam kurun waktu kurang dari setahun harga rata-rata tanah naik menjadi Rp. 3,69 Juta/m² atau naik sekitar 36%. Bahkan untuk tanah di daerah Bandung Utara harga rata-rata bisa mencapai 9,19 Juta/m². Kepemilikan asset produksi misalnya tanah, bangunan dan modal usaha akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi warga di daerah tersebut. Dengan adanya penanaman modal di kota Bandung yang mempengaruhi penghasilan perusahaan dan perorangan serta konsumsi atas barang dan jasa maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat khususnya wajib pajak untuk membayar pajak. Pemerintah kota Bandung berusaha menggalakkan kegiatan promosi untuk menarik investor asing agar dapat menanamkan modalnya di kota Bandung (www.urbanindo.com).

Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan pajak pusat, pertumbuhan ekonomi dan investasi di kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Pusat, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
di Kota Bandung Tahun 2010-2014

Tahun	Penerimaan Pajak Pusat	PDRB (juta rupiah)	Investasi (juta rupiah)
2010	5.852.988.177.330	82.002.176	16.573.918
2011	8.316.229.440508	95.612.863	13.591.014
2012	9.195.555.626.738	131.989.539	3.362.168
2013	11.066.362.951.139	151.772.416	5.977.939
2014	2.945.441.812.465	172.629.382	1.127.467

Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat 1, (www.bandungkota.bps.go.id), (www.bappeda-bandung.go.id) dan data diolah oleh penulis (2016)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak pusat di kota Bandung selalu meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun pada tahun 2014 penerimaan pajak pusat di kota Bandung menurun sebesar 73%. PDRB kota Bandung dari tahun 2011 sampai 2014 selalu meningkat. Dari tahun 2010 sampai 2013 seiring dengan peningkatan penerimaan pajak

pusat di kota Bandung, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Bandung juga meningkat rata-rata 20% setiap tahunnya namun di tahun 2014 pada saat penerimaan pajak pusat di kota Bandung menurun, PDRB di kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak pusat di tahun 2010 dan tahun 2012, investasi di kota Bandung yang terdiri dari total PMA, PMDN dan Non PMA dan PMDN mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2013. Kemudian pada tahun 2013, investasi mengalami kenaikan sekitar 77% dan kembali turun di tahun 2014 sebesar 80%.

Realisasi nilai investasi di kota Bandung pada tahun 2011, menurun dari tahun sebelumnya total nilai investasi kota Bandung pada tahun 2011 yaitu Rp 11,6 triliun atau turun Rp 4,9 triliun (29,7%) dibanding 2010. Kepala Bidang Penanaman Modal Bappeda kota Bandung Aman Raksanagara mengatakan, banyak faktor yang diperkirakan menyebabkan nilai investasi di kota Bandung menurun. Misalnya, kepuasan pelayanan yang menurun, kondisi infrastruktur, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan sosial di kota Bandung. Namun angka investasi tahun 2010-2011 tidak terlalu mengecewakan. "Jika mengukur tingkat perkembangan investasi tidak hanya bisa dilihat dari jumlah atau angka saja, melainkan harus dari kualitas investasinya, dan juga harus diimbangi dengan ekspor", kata Aman (www.pikiran-rakyat.com).

Kebijakan pemerintah di sektor pajak besar pengaruhnya terhadap investasi. Pajak tersebut akan mengurangi hasil investasi yang dilaksanakan atau hasil investasi harus digunakan sebagian untuk membayar pajak dan tarif pajak mempengaruhi laba yang akan diperoleh investor. Tujuan dari perpajakan itu sendiri adalah untuk menekan konsumsi dan investasi dari kegiatan sosial sehingga sistem administrasi dapat menyediakan barang dan jasa. Peningkatan kemampuan untuk membayar pajak juga dipicu dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat suatu daerah tinggi maka kemampuan untuk membayar pajak pun semakin besar. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) akan meningkat sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi karena semakin besar penghasilan perusahaan dan perorangan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi karena semakin besar jumlah transaksi ekonomi yang terjadi.

Sehubungan dengan hal ini, dalam penelitian Edame (2014) menunjukkan bahwa *“The result therefore showed that taxation is negatively related to the level of investment and the output of goods and services (GDP) and is positively related to government expenditure in Nigeria.”* Sedangkan dalam penelitian Wijaya (2013) menunjukkan bahwa *“Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.”* Dalam penelitian Mahmood (2013) menyatakan bahwa *“Foreign direct investment and gross domestic product per person employed have positive and significant impact on tax revenue.”* Sedangkan dalam penelitian Prasajo (2015) menyatakan bahwa *“Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.”*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai penerimaan pajak. Karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penerimaan Pajak Pusat (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Tahun 2010-2014)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. (www.pajak.go.id). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Dengan meningkatnya perekonomian dan investasi di kota Bandung tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan investasi yang meningkat di

setiap tahunnya, namun pada tahun 2014 penerimaan pajak pusat untuk wilayah Bandung mengalami penurunan di semua Kantor Pelayanan Pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pusat belum dipahami secara baik dan masih harus dikaji. Hal tersebut membuat banyak peneliti melakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut dan berbagi aspek dan sampel.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi dan penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung tahun 2010-2014?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan terhadap penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung 2010-2014?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung 2010-2014?
 - b. Investasi terhadap penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung tahun 2010-2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi, investasi dan penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung tahun 2010-2014.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi secara simultan terhadap penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung tahun 2010-2014.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung tahun 2010-2014.

- b. Investasi terhadap penerimaan pajak pusat pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung tahun 2010-2014.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penerimaan pajak pusat.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai penerimaan pajak pusat.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah kota Bandung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi dan investasi di kota Bandung sehingga pemerintah kota Bandung dapat menggunakannya sebagai referensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkualitas.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang penerimaan pajak kota Bandung dan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di kota Bandung.

- c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan bagi wajib pajak bisa lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya agar penerimaan negara di sektor pajak meningkat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan dua variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pusat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang mempengaruhi penerimaan pajak pusat.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah 6 Kantor Pelayanan Pajak kota Bandung yaitu, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Tegalega dengan objek penelitian yang digunakan adalah penerimaan pajak pusat. Data penelitian ini diambil dari website resmi BPS Kota Bandung (www.bandungkota.bps.go.id), website (www.bappeda.bandung.go.id) dan penerimaan pajak dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga Agustus 2016. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2010-2014.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian berisi tentang teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data

yang dapat menjelaskan penelitian. Meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Meliputi karakteristik responden, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan hasil penelitian serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN